



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jl. R.A. Kartini no. 35  
Palu - 94112

Telp. : 0451-422196 ; 424570  
Faks : 0451- 423039

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURDIN, SE.,M.Si  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SUMARNO, SE  
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku Atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 05 November 2025

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN

SUMARNO, SE  
NIP. 19670527 199403 1 013

NURDIN, SE.,M.Si  
NIP. 19730317 200212 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESSELON III  
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	❖ Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1.	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi &amp; pelaporan</b>	<b>NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH</b>	<b>83%</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>		
	Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
	Tersedianya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan
2.	<b>Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)</b>	<b>TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH</b>	<b>60%</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>		
	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/Bulan
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
3.	<b>Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang &amp; Jasa secara elektronik Perangkat Daerah</b>	<b>INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH</b>	<b>60%</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>		

	Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional atau Lapangan yang di Sediakan	3 Unit
	Terpenuhinya Mebel	Jumlah Unit Mebel	1 Paket
	Terpenuhinya Fasilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit fasilitas gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Paket
	Terkelolanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang di Sediakan	1 Paket
4.	<b>Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah</b>	<b>INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH</b>	60%
	<b>Sub Kegiatan</b>		
	Terpenuhinya Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Orang
5.	<b>Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum Perangkat Daerah</b>	<b>INDEKS REFORMASI HUKUM PERANGKAT DAERAH</b>	60%
	<b>Sub Kegiatan</b>		
	Terpasangnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang DiSediakan	1 Paket
	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket

	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di Sediakan	2 Paket
	Terselenggarakannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit
	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	2 Unit
6.	<b>Meningkatnya pengawasan kearsipan internal perangkat daerah</b>	<b>Indeks SPBE Perangkat Daerah</b>	60%
	<b>Sub Kegiatan</b>		
	Terlayaninya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
	Terlayaninya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di Sediakan	1 Laporan
	Terlayaninya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
	Terlayaninya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan	1 Laporan

Program	Anggaran	Keterangan
---------	----------	------------

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 18.400.625.674	APBD
---	--------------------	------

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
----------	----------	------------

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.511.752.750,00	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 12.784.451.415	APBD
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 371.300.810	APBD
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 767.865.000	APBD
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 669.368.201	APBD
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.093.573.632	APBD
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.214.350.616	APBD

Palu, 05 November 2025

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN

  
SUMARNO, SE  
NIP. 19670527 199403 1 013

  
NURDIN, SE., M.Si  
NIP. 19730317 200212 1 001



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jl. R.A. kartini no. 35  
Palu - 94112

Telp. : 0451-422196 ; 424570  
Faks : 0451- 423039

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. HATIYAH YAHYA, M. Si  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SUMARNO, SE  
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku Atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 November 2025

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BIDANG PELAYARAN & LLASDP

SUMARNO, SE  
NIP. 19670527 199403 1 013

DR. HATIYAH YAHYA, M. Si  
NIP. 19701020 199203 2 005


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESSELON III  
KEPALA BIDANG PELAYARAN & LLASDP  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya ketersediaan Sarana & Prasarana serta dukungan keselamatan perhubungan laut dan ASDP	❖ Persentase ketersediaan Sarana & Prasarana serta dukungan keselamatan perhubungan laut dan ASDP	100%

Program	Anggaran	Keterangan
<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>	<b>Rp. 1.416.091.934</b>	APBD
1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Rp 67.620.100	
2. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Rp 221.274.942	
3. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 441.417.437	
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 730.312.479</b>	

Palu, 06 November 2025

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

  
SUMARNO, SE  
NIP. 19670527 199403 1 013

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BIDANG PELAYARAN & LLASDP

  
DR. HATIYAH YAHYA, M. Si  
NIP. 19701020 199203 2 005



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jl. R.A. kartini no. 35  
Palu - 94112

Telp. : 0451-422196 ; 424570  
Faks : 0451- 423039

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASNANSYAH, SH., M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SUMARNO, SE  
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku Atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 November 2025

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

SUMARNO, SE  
NIP. 19670527 199403 1 013

PIHAK PERTAMA  
plt. KEPALA BIDANG ANGKUTAN KESELAMATAN  
JALAN & PERKERETAAPIAN

ASNANSYAH, SH., M.Si  
NIP. 19751228 200012 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESSELON III  
KEPALA BIDANG ANGKUTAN, KESELAMATAN JALAN,  
& PERKERETAAPIAN TAHUN 2025**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Angkutan Jalan, Perkeretaapian	Persentase Penyelenggaraan Angkutan Jalan, Perkeretaapian	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan</b>	<b>Rp. 885.869.992</b>	<b>APBD</b>
1.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 47.473.500	
2.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</li> <li>• Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi</li> <li>• Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</li> </ul>	Rp 771.420.042	
3.	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.990.000	
4.	Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan	Rp 37.550.450	
5.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Rp 26.436.000	
	<b>Program Pengelolaan Perkeretaapian</b>	<b>Rp 3.503.500</b>	<b>APBD</b>
6.	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Rp 3.503.500	
	<b>Total</b>	<b>Rp 889.373.492</b>	

Palu, 06 November 2025

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



SUMARNO, SE  
NIP. 19670527 199403 1 013

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BIDANG ANGKUTAN  
KESELAMATAN JALAN & PERKERETAAPIAN



ASNANSYAH, SH., M.Si  
NIP. 19751228 200012 1 001



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jl. R.A. kartini no. 35  
Palu - 94112

Telp. : 0451-422196 ; 424570  
Faks : 0451- 423039

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INTJE MOH ILYAS, SH  
Jabatan : plt. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SUMARNO, SE  
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku Atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 November 2025

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

SUMARNO, SE  
NIP. 19670527 199403 1 013

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN

INTJE MOH ILYAS, SH  
NIP. 19700706 199203 1 012


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
ESSELON III KEPALA BIDANG LALU  
LINTAS JALAN TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatnya ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	100%


<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan	<b>Rp. 5.573.924.222,00</b>	<b>APBD</b>
1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	<i>Rp 5.351.722.672,00</i>	
2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	<i>Rp 127.965.250,00</i>	
3. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	<i>Rp 14.345.300,00</i>	
4. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Rp 79.891.000,00</i>	
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 5.573.924.222,00</b>	

Palu, 06 November 2025

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

  
SUMARNO, SE  
NIP. 19670527 199403 1 013

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN

  
INTJE MOH ILYAS, SH  
NIP. 19700706 199203 1 012



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jl. R.A. kartini no. 35  
Palu - 94112

Telp. : 0451-422196 ; 424570  
Faks : 0451- 423039

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULFAHMI I.H, S.STP  
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SUMARNO, SE  
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku Atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 November 2025

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

SUMARNO, SE  
NIP. 19670527 199403 1 013

PIHAK PERTAMA  
KEPALA UPTD PENGELOLAAN PRASARANA  
PERHUBUNGAN

ZULFAHMI I.H, S.STP  
NIP. 19921112 201406 1 001


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESSELON III  
KEPALA UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	❖ Indeks Reformasi Birokrasi	60

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 862.119.982,00	APBD
2. Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 117.911.150,00	
3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 46.091.150,00	
<b>Total</b>	<b>Rp. 1.026.122.282</b>	

Palu, 06 November 2025

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

  
SUMARNO, SE  
NIP. 19670527 199403 1 013

PIHAK PERTAMA  
KEPALA UPTD PENGELOLAAN PRASARANA  
PERHUBUNGAN

  
ZULFAHMI I.H, S.STP  
NIP. 19921112 201406 1 001



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

## DINAS PERHUBUNGAN

Jl. R.A. kartini no. 35  
Palu - 94112

Telp. : 0451-422196 ; 424570  
Faks : 0451- 423039

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRAWAN, S.Si  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program , Keuangan dan Asset Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURDIN, SE.,M.Si  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku Atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 05 November 2025

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM KEUANGAN  
DAN ASSET

NURDIN, SE.,M.Si  
NIP. 19730317 200212 1 001

IRAWAN, S.Si  
NIP. 19740823 201407 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESSELON IV  
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASSET  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p><i>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>• Tersedianya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</li> <li>• Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>• Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ul>	<p>6 Dokumen</p> <p>3 Dokumen</p> <p>3 Laporan</p>
2.	<p><i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>• Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan</li> <li>• Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>• Jumlah Dokumen Laporan Keuangan</li> <li>• Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> </ul>	<p>110 Orang/Bulan</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Laporan</p>
3.	<p><i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>• Tersedianya Mebel</li> <li>• Tersedianya Fasilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> <li>• Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya</li> </ul>	<p><i>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Unit Kendaraan Operasional atau Lapangan yang di Sediakan</li> <li>• Jumlah Unit Mebel</li> <li>• Jumlah unit fasilitas gedung kantor atau bangunan lainnya</li> <li>• Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang di Sediakan</li> </ul>	<p>16 Laporan</p> <p>3 Unit</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p>
4.	<p><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>• Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ul>	<p><i>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</li> <li>• Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi</li> </ul>	<p>6 Laporan</p> <p>40 Unit</p> <p>2 Unit</p>

	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Ket</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 1.511.752.750,00</b>	<b>APBD</b>
	* Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 289,492,750.00	
	* Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 57,935,000.00	
	* Sub. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Rp 1,164,325,000.00	
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 13.379.632.926,18</b>	<b>APBD</b>
	* Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 13,076,152,926.18	
	* Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 303,480,000.00	
<b>3.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp 59,374,340.00</b>	<b>APBD</b>
	* Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp 59,374,340.00	
<b>4.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 80.770.000,00</b>	
	* Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 80,770,000.00	
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 559.205.000,00</b>	<b>APBD</b>
	* Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 477,530,000.00	
	* Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 42,000,000.00	
	* Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 39,675,000.00	
	<b>Total</b>	<b>Rp 15.590.735.016,18</b>	



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jl. R.A. Kartini no. 35  
Palu - 94112

Telp. : 0451-422196 ; 424570  
Faks : 0451- 423039

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADIWIGUNA KAWANDAUD, S.Kom  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Perhubungan  
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : NURDIN, SE.,M.Si  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku Atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 05 November 2025

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN

NURDIN, SE, M.Si  
NIP. 19730317 200212 1 001

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN  
DAN UMUM

ADIWIGUNA KAWANDAUD, S.Kom, M.AP  
NIP. 19820416 200604 1 013

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESSELON IV  
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p><i>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Dokumen SKM</li> <li>• Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</li> </ul>	<p>2 Laporan</p> <p>6 orang</p>
2.	<p><i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>• Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>• Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>	<p><i>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa dan Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang DiSediakan</li> <li>• Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DiSediakan</li> <li>• Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang DiSediakan</li> <li>• Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di Sediakan</li> <li>• Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>	<p>25 Laporan</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>2 Paket</p> <p>1 Laporan</p>
3.	<p><i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Jasa Surat Menyurat</li> <li>• Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>• Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>• Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul>	<p><i>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>• Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan</li> <li>• Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>• Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan</li> </ul>	<p>4 Laporan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p>

Kegiatan	Anggaran	Ket
<b>1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 231.422.684,00</b>	<b>APBD</b>
* Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 208,922,684.00	
* Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 22,500,000.00	
<b>2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 4.892.716.484</b>	<b>APBD</b>
* Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 15,972,954.00	
* Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 4,386,651,800.00	
* Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 24,113,830.00	
* Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 33,364,900.00	
* Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 432,613,000.00	

<b>3. Kegiatan Jasa Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 1.250.837.880,00</b>	<b>APBD</b>
* Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 10,650,000.00	
* Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 292,187,880.00	
* Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp176,800,000.00	
* Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 771,200,000.00	

**Total**

**Rp 6.374.997.048,00**

Palu, 05 November 2025

PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN



NURDIN, SE, M.Si  
NIP. 19730317 200212 1 001

PIHAK KEDUA  
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN  
DAN UMUM



ADIWIGUNA KAWANDAUD, S.Kom, M. AP  
NIP. 19820416 200604 1 013



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jl. R.A. Kartini no. 35  
Palu - 94112

Telp. : 0451-422196 ; 424570  
Faks : 0451-423039

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INTJE MOH. ILYAS, SH  
Jabatan : Kepala Seksi Manajemen Rakayasa Lalu Lintas  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : INTJE MOH. ILYAS, SH  
Jabatan : plt. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Tengah

Selaku Atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).


**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 November 2025

PIHAK KEDUA  
plt.KEPALA BIDANG LALU LINTAS  
JALAN

  
INTJE MOH. ILYAS, SH  
NIP. 19700706 199203 1 012

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN  
REKAYASA LALU LINTAS

  
INTJE MOH. ILYAS, SH  
NIP. 19700706 199203 1 012

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESSELON IV  
KEPALA SEKSI MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS  
TAHUN 2025**


NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p><i>Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya pengaturan kelancaran lalu lintas pada hari-hari besar agama/nasional</li> <li>• Tersusunnya kajian kebijakan penataan parkir didalam suatu kawasan</li> <li>• Terlaksananya forum lalu lintas dan angkutan jalan</li> </ul>	<p><i>Persentase Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pengaturan kelancaran lalu lintas pada hari-hari besar agama/nasional</li> <li>• Jumlah dokumen kebijakan penataan parkir didalam suatu kawasan</li> <li>• Jumlah rekomendasi forum lalu lintas &amp; angkutan jalan</li> </ul>	<p>100%</p> <p>36 Kali</p> <p>1 Dokumen</p> <p>4 Rekomendasi</p>
2.	<p><i>Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya verifikasi dokumen andalalin yang sesuai standar</li> <li>• Terlaksananya pengawasan rekomendasi andalalin</li> </ul>	<p><i>Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dokumen verifikasi andalalin yang sesuai standar</li> <li>• Jumlah pengawasan rekomendasi andalalin</li> </ul>	<p>8 dokumen &amp; rekomendasi</p> <p>9 Rekomendasi</p>


Kegiatan	Anggaran	Ket
<b>1. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>	<b>Rp. 127.965.250,00</b>	<b>APBD</b>
* Sub. Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp. 89.775.000,00	
* Sub. Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp. 38.190.250,00	
<b>2. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>	<b>Rp. 14.345.300,00</b>	<b>APBD</b>
* Sub. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Rp. 14.345.300,00	
<b>Total</b>	<b>Rp. 142.310.550,00</b>	

Palu, 06 November 2025

PIHAK KEDUA  
plt.KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI MANAJEMEN  
REKAYASA LALU LINTAS

  
INTJE MOH. ILYAS, SH  
NIP. 19700706 199203 1 012

  
INTJE MOH. ILYAS, SH  
NIP. 19700706 199203 1 012



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jl. R.A. Kartini no. 35  
Palu - 94112

Telp. : 0451-422196 ; 424570  
Faks : 0451- 423039

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMIRRUDIN, SH  
Jabatan : Kepala Seksi Prasarana Lalu Lintas  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : INTJE MOH. ILYAS, SH  
Jabatan : plt. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Tengah


Selaku Atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
plt. KEPALA BIDANG LALU LINTAS  
JALAN

  
INTJE MOH ILYAS, SH  
NIP. 19700706 199203 1 012

Palu, 06 November 2025  
PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI PRASARANA  
LALU LINTAS

  
AMIRRUDIN, SH  
NIP. 19700404 199303 1 011

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESSELON IV  
KEPALA SEKSI PRASARANA LALU LINTAS  
TAHUN 2025**


NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<i>Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya rambu lalu lintas</li> <li>• Tersedianya Marka jalan</li> <li>• Tersedianya Lampu penerangan jalan umum</li> <li>• Terlaksananya Rehabilitas lampu penerangan jalan</li> <li>• Terlaksananya survey kebutuhan FASKES lalu lintas jalan</li> <li>• Terlaksananya Inspeksi pemasangan FASKES</li> </ul>	<i>Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah rambu lalu lintas</li> <li>• Jumlah Marka jalan</li> <li>• Jumlah Lampu penerangan jalan umum</li> <li>• Jumlah Rehabilitas lampu penerangan jalan</li> <li>• Jumlah dokumen rekomendasi kebutuhan FASKES lalu lintas jalan</li> <li>• Jumlah Inspeksi pemasangan FASKES</li> </ul>	100%  309 Titik Lokasi 2397 Meter  72 Unit  2 Unit  1 Dokumen  1 Dokumen
2	<i>Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan di Jalan Provinsi</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya Rehabilitas lampu penerangan jalan</li> </ul>	<i>Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Provinsi</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Rehabilitas lampu penerangan jalan</li> </ul>	2 Unit


Kegiatan	Anggaran	Ket
<b>1. Kegiatan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>	<b>Rp. 5.351.722.672,00</b>	<b>APBD</b>
* Sub. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Rp. 5.029.622.422,00	
* Sub. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp. 322.100.250,00	
<b>Total</b>	<b>Rp 5.351.722.672,00</b>	

Palu, 06 November 2025

PIHAK KEDUA  
plt. KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI PRASARANA  
LALU LINTAS

  
 INTJE MOH ILYAS, SH  
 NIP. 19700706 199203 1 012

  
 AMIRRUDIN, SH  
 NIP. 19700404 199303 1 011



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jl. R.A. Kartini no. 35  
Palu - 94112

Telp. : 0451-422196 ; 424570  
Faks : 0451- 423039

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Plh. ANDRI HABRIN, S.Tr  
Jabatan : Kepala Seksi Angkutan Jalan Dan Terminal  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ASNANSYAH, SH., M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Angkutan Keselamatan Jalan Dan Perkeretaapian

Selaku Atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 November 2025

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG ANGKUTAN, KESELAMATAN JALAN,  
DAN PERKERETAAPIAN

  
ASNANSYAH, SH., M.Si  
NIP. 19670320 199403 1 007

PIHAK PERTAMA  
Plh. KEPALA SEKSI ANGKUTAN JALAN  
DAN TERMINAL

  
ANDRI HABRIN, S.Tr  
NIP. 19820406 200902 1 002


**PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV  
KEPALA SEKSI ANGKUTAN JALAN DAN TERMINAL  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p><i>Terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya Review kajian integrasi angkutan antarmoda</li> <li>• Tersusunnya penetapan jaringan trayek sesulawesi tengah</li> </ul>	<p><i>Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah review kajian integrasi angkutan antarmoda Trans PADAGI</li> <li>• Jumlah penetapan jaringan trayek sesulawesi tengah yang ditetapkan</li> </ul>	<p>1 Review</p> <p>1 Pergub</p>
2.	<p><i>Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya pemantauan pemenuhan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum</li> <li>• Terverifikasinya persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum</li> <li>• Terlaksananya pengawasan izin penyelenggaraan angkutan umum</li> <li>• Tersosialisasinya perizinan penyelenggaraan angkutan umum</li> <li>• Terevisinya regulasi sesuai dengan kebutuhan pengguna angkutan</li> <li>• Tersusunnya Penetapan Tarif angkutan umum kelas ekonomi</li> <li>• Terlaksananya pengawasan &amp; Penindakan penerapan Tarif angkutan umum kelas ekonomi</li> <li>• Terlaksananya inspeksi keselamatan jalan</li> <li>• Terlaksananya audit keselamatan jalan</li> <li>• Terlaksananya pengendalian pelaksanaan Standar pelayanan minimal angkutan orang/angkutan barang umum</li> <li>• Terverifikasinya persyaratan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus</li> <li>• Terawasainya penyelenggaraan angkutan sewa khusus</li> </ul>	<p><i>Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pemantauan pemenuhan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum</li> <li>• Jumlah perusahaan angkutan umum yang terverifikasi</li> <li>• Jumlah pengawasan izin penyelenggaraan angkutan umum</li> <li>• Jumlah sosialisasi perizinan penyelenggaraan angkutan umum</li> <li>• Jumlah regulasi sesuai dengan kebutuhan pengguna angkuta</li> <li>• Jumlah PERGUB Tarif angkutan umum kelas ekonomi yang ditetapkan</li> <li>• Jumlah pengawasan &amp; Penindakan penerapan Tarif angkutan umum kelas ekonomi</li> <li>• Jumlah inspeksi keselamatan jalan</li> <li>• Jumlah audit keselamatan jalan</li> <li>- Jumlah perusahaan jasa angkutan orang umum yang terkendalikan sesuai dengan SPM</li> <li>- Jumlah perusahaan jasa angkutan barang umum yang terkendalikan sesuai dengan SPM</li> <li>• Jumlah pelaku usaha angkutan sewa khusus yang terverifikasi</li> <li>• Jumlah penyelenggaraan angkutan sewa khusus</li> </ul>	<p>18 Terminal</p> <p>7 Perusahaan</p> <p>5 kali</p> <p>100 Orang</p> <p>1 Regulasi</p> <p>1 Pergub</p> <p>18 Perusahaan</p> <p>4 Ruas Jalan Provinsi</p> <p>4 Ruas Jalan Provinsi</p> <p>7 Perusahaan</p> <p>50 Badan hukum/perseorangan</p> <p>100 pelaku usaha</p> <p>100 pelaku ASK</p>

Kegiatan	Anggaran	Ket
<b>1. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 2.999.000</b>	<b>APBD</b>
* Sub. Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Rp. 2.999.000	
<b>2. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Rp. 590.824.700</b>	<b>APBD</b>
* Sub. Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rp. 590.824.700	
<b>3. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>		
* Sub Penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Rp 26.436.000	
<b>4. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Rp. 47.473.500</b>	
<b>Total</b>	<b>Rp 667.733.200</b>	

Palu, 06 November 2025

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN

  
ASNANSYAH, SH., M.Si  
NIP. 19670320 199403 1 007

PIHAK PERTAMA  
Plh. KEPALA SEKSI ANGKUTAN  
JALAN DAN TERMINAL

  
ANDRI HABRIN, S.Tr  
NIP. 19820406 200902 1 002



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jl. R.A. Kartini no. 35  
Palu - 94112

Telp. : 0451-422196 ; 424570  
Faks : 0451-423039

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ph. MOH. TILFAN MASLOMAN, S.Kom., MAP  
Jabatan : Kepala Seksi Keselamatan Jalan  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ASNANSYAH, SH., M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Angkutan Keselamatan Jalan Dan Perkeretaapian

Selaku Atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).


**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 November 2025

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG ANGKUTAN, KESELAMATAN JALAN,  
DAN PERKERETAAPIAN

  
ASNANSYAH, SH., M.Si  
NIP. 19670320 199403 1 007

PIHAK PERTAMA  
Ph. KEPALA SEKSI KESELAMATAN JALAN

  
MOH. TILFAN MASLOMAN, S.Kom., MAP  
NIP. 19891014 201503 1 003

**PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV  
KEPALA SEKSI KESELAMATAN JALAN  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p><i>Terlaksananya Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggaranya kampanye keselamatan lalu lintas &amp; angkutan jalan</li> <li>• Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas pengemudi angkutan umum/barang (Abdiyasa)</li> <li>• Terselenggaranya pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan</li> </ul>	<p><i>Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kampanye keselamatan lalu lintas &amp; angkutan jalan, dan mudik gratis</li> <li>• Jumlah Peningkatan Kapasitas angkutan umum/barang (Abdiyasa)</li> <li>• Jumlah pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan</li> </ul>	<p>4 Kegiatan</p> <p>26 Orang</p> <p>26 Orang</p>

Kegiatan	Anggaran	Ket
<b>1. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Rp. 180.595.342</b>	<b>APBD</b>
* Sub. Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audi dan Pemantauan Terminal	Rp 8.612.000	
* Sub. Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Rp 171.983.342	
<b>Total</b>	<b>Rp 180.595.342</b>	

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG ANGKUTAN, KESELAMATAN JALAN, DAN  
PERKERETAAPIAN

  
ASNANSYAH, SH., M.Si

NIP. 19670320 199403 1 007

Palu, 06 November 2025  
PIHAK PERTAMA  
Ph. KEPALA SEKSI KESELAMATAN  
JALAN

  
MOH. TILFAN MASLOMAN,  
S.Kom., MAP  
NIP. 19891014 201503 1 003



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jl. R.A. Kartini no. 35  
Palu - 94112

Telp. : 0451-422196 ; 424570  
Faks : 0451-423039

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ph. NURHASNA, SE  
Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : DR. HATIYAH YAHYA, M. Si  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP

Selaku Atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 05 November 2025

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG PELAYARAN DAN LLASDP

DR. HATIYAH YAHYA, M. Si  
NIP. 19701020 199203 2 005

PIHAK PERTAMA  
Pih. KEPALA SEKSI LALU LINTAS  
ANGKUTAN LAUT

NURHASNA, SE  
NIP. 19711208 199703 2 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESSELON IV  
KEPALA SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p><i>Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kab/kota dalam wilayah daerah provinsi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya Pergub izin usaha angkutan laut</li> <li>• Tersusunnya Pergub Izin Trayek</li> <li>• Tersosialisasinya Kesadaran izin pelayaran penyedia jasa angkutan laut</li> <li>• Terselenggaranya kampanye keselamatan pelayaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Pergub Izin angkutan laut yang ditetapkan</li> <li>• Jumlah Pergub Izin trayek yang ditetapkan</li> <li>• Jumlah penyedia jasa angkutan laut yang tersosialisasi tentang izin pelayaran</li> <li>• Jumlah orang yang mengikut kampanye keselamatan pelayaran</li> </ul>	<p>1 Pergub 17 Penyedia Jasa 150 Orang</p>
2	<p><i>Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggaranya pendampingan kepatuhan kegiatan operasional perusahaan pelayaran, Perusahaan bongkar muat, jasa pengurusan transportasi &amp; Depo Peti Kemas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pendampingan kepatuhan kegiatan operasional perusahaan pelayaran</li> <li>• Jumlah Perusahaan bongkar muat</li> <li>• Jumlah jasa pengurusan transportasi</li> <li>• Jumlah Depo Peti Kemas</li> </ul>	<p>5 Penyedia 20 Jasa 3 Depo</p>

Kegiatan	Anggaran	Ket
<p><b>1. Kegiatan Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kab/kota dalam wilayah daerah provinsi</b></p> <p>* Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi</p>	<p><b>Rp 67.620.100</b></p> <p>Rp. 67.620.100</p>	<p><b>APBD</b></p>
<p><b>2. Kegiatan Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas</b></p> <p>* Sub. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut / peralatan</p>	<p><b>Rp 221.274.942</b></p> <p>Rp 221.274.942</p>	<p><b>APBD</b></p>

jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas

**Total**

**Rp. 288.895.042**

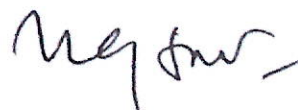
Palu, 05 November 2025

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BIDANG PELAYARAN DAN LLASDP

PIHAK KEDUA  
Ph. KEPALA SEKSI LALU LINTAS  
ANGKUTAN LAUT



DR. HATIYAH YAHYA, M. Si  
NIP. 19701020 199203 2 005



NURHASNA, SE  
NIP. 19711208 199703 2 005



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jl. R.A. Kartini no. 35  
Palu - 94112

Telp. : 0451-422196 ; 424570  
Faks : 0451- 423039

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURSIDIN BASO ALI, S.Sos., M.AP  
Jabatan : Kepala Seksi Kepelabuhanan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : DR. HATIYAH YAHYA, M. Si  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP

Selaku Atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 05 November 2025

PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG PELAYARAN DAN LLASDP

DR. HATIYAH YAHYA, M. Si  
NIP. 19701020 199203 2 005

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI KEPELABUHANAN

NURSIDIN BASO ALI, S.Sos., M.AP  
NIP. 19691012 199403 1 011

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESSELON IV  
KEPALA SEKSI KEPELABUHANAN  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p><i>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dalam Kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah</li> <li>• Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi pengawasan tata kelola Pelabuhan</li> <li>• Tersusunnya rencana pengawasan dan pengendalian tata kelola Pelabuhan</li> <li>• Tersusunnya rekomendasi hasil evaluasi rencana induk pelabuhan (RIP)</li> <li>• Tersusunnya rekomendasi hasil evaluasi rencana DLKr/DLKp Pelabuhan Regional</li> <li>• Tersusunnya rekomendasi hasil evaluasi rencana DLKr/DLKp Pelabuhan TERSUS</li> <li>• Tersusunnya rekomendasi hasil evaluasi rencana TERSUS</li> <li>• Tersedianya data jumlah penumpang dan barang pengguna Pelabuhan</li> <li>• Tersedianya izin reklamasi, pembangunan, &amp; usaha jasa wilayah pelabuhan regional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Terpelihara dan Beroperasi di Provinsi Sulawesi Tengah</li> <li>• Jumlah penyelenggaraan sinkronisasi dan pengawasan</li> <li>• Jumlah rencana pengawasan dan pengendalian tata kelola pelabuhan</li> <li>• Jumlah rekomendasi hasil evaluasi rencana induk pelabuhan (RIP)</li> <li>• Jumlah rekomendasi hasil evaluasi rencana DLKr/DLKp Pelabuhan Regional</li> <li>• Jumlah rekomendasi hasil evaluasi rencana DLKr/DLKp Pelabuhan TERSUS</li> <li>• Jumlah rekomendasi hasil evaluasi rencana TERSUS</li> <li>• Jumlah dokumen data &amp; informasi penumpang dan barang pengguna pelabuhan</li> <li>• Jumlah izin reklamasi, pembangunan, &amp; usaha jasa wilayah pelabuhan regional</li> </ul>	3 Pelabuhan

	Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 441.417.437	APBD
	<i>Total</i>	<i>Rp. 441.417.437</i>	

Palu, 05 November 2025

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BIDANG PELAYARAN DAN LLASDP



DR. HATIYAH YAHYA, M. Si  
NIP. 19701020 199203 2 005

PIHAK KEDUA  
KEPALA SEKSI KEPSELABUHANAN



NURSIDIN BASO ALI, S.Sos., M.AP  
NIP. 19691012 199403 1 011



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jl. R.A. Kartini no. 35  
Palu - 94112

Telp. : 0451-422196 ; 424570  
Faks : 0451- 423039

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAHLIA SUKMARINI, SE., MAP  
Jabatan : Kepala SUB Bagian Tata Usaha UPTD

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ZULFAHMI I.H, S.STP  
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan

Selaku Atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 05 November 2025

PIHAK KEDUA  
KEPALA UPTD PENGELOLAAN PRASARANA  
PERHUBUNGAN

  
ZULFAHMI I.H, S.STP  
NIP. 19921112 201406 1 001

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD

  
DAHLIA SUKMARINI, SE MAP  
NIP. 19740717 199903 2 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESSELON IV  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• <i>Persentase Pengelolaan Prasarana Perhubungan</i>	
2.	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan</li> <li>• Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>• Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>• Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan</li> <li>• Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang</li> <li>• Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</li> <li>• Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di Sediakan</li> <li>• Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di</li> </ul>	<p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>2 Paket</p> <p>8 Unit</p>
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang di Sediakan</li> </ul>	3 Unit
4.	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Jasa Surat Menyurat</li> <li>• Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>• Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul>	<i>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>• Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan</li> <li>• Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan</li> </ul>	<p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p>

<b>1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 32.132.900,00</b>	<b>APBD</b>
* Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 32.132.900,00	
<b>2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 64.427.132,00</b>	<b>APBD</b>
* Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2,805,216.00	
* Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 50,280,511.00	
* Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 6,366,905.00	
* Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 4,974,500.00	

<p>3. <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b></p> <p>* Sub. Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat</p> <p>* Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</p> <p>* Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>	<p><b>Rp 747.141.950,00</b></p> <p>Rp. 1,504,000.00</p> <p>Rp. 94,237,950.00</p> <p>Rp. 651,400,000.00</p>	<p><b>APBD</b></p>
<p>4. <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b></p> <p>* Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>* Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>	<p><b>Rp 18.310.000,00</b></p> <p>Rp 5,680,000.00</p> <p>Rp 12,630,000.00</p>	<p><b>APBD</b></p>

**Total**

**Rp. 862.011.982,00**

Palu, 05 November 2025

PIHAK PERTAMA  
KEPALA UPTD PENGELOLAAN  
PRASARANA PERHUBUNGAN

PIHAK KEDUA  
KEPALA SUB BAGIAN TATA  
USAHA UPTD



ZULFAHMI I.H, S.STP  
NIP. 19921112 201406 1 001



DAHLIA SUKMARINI, SE MAP  
NIP. 19740717 199903 2 007



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jl. R.A. kartini no. 35  
Palu - 94112

Telp. : 0451-422196 ; 424570  
Faks : 0451- 423039

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURYADIN SH  
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Terminal

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ZULFAHMI I.H, S.STP  
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan

Selaku Atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 05 November 2025

PIHAK KEDUA  
KEPALA UPTD PENGELOLAAN  
PRASARANA PERHUBUNGAN

  
ZULFAHMI I.H, S.STP  
NIP. 19921112 201406 1 001

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN TERMINAL

  
NURYADIN SH  
NIP. 19780330 200604 1 012

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESSELON IV  
KEPALA PENGELOLAAN TERMINAL  
TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	<i>Terpeliharanya prasarana Terminal Tipe B sesuai standar</i>	<i>Jumlah prasarana yang terpelihara sesuai dengan standar</i>	<i>2 Terminal</i>


Kegiatan	Anggaran	Ket
1. <b>Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b> * Sub. Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Rp 46,091,150.00	<b>APBD</b>
<b>Total</b>	<b>Rp. 46.091.150,00</b>	

Palu, 05 November 2025

PIHAK PERTAMA  
KEPALA UPTD PENGELOLAAN PRASARANA  
PERHUBUNGAN

PIHAK KEDUA  
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN TERMINAL

  
ZULFAHMI I.H, S.STP  
NIP. 19921112 201406 1 001

  
NURYADIN SH  
NIP. 19780330 200604 1 012



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jl. R.A. Kartini no. 35  
Palu - 94112

Telp. : 0451-422196 ; 424570  
Faks : 0451- 423039

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SLAMET, Ama. PKB, SH  
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Pelabuhan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ZULFAHMI I.H, S.STP  
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan

Selaku Atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 05 November 2025

PIHAK KEDUA  
KEPALA UPTD PENGELOLAAN  
PRASARANA PERHUBUNGAN

  
ZULFAHMI I.H, S.STP  
NIP. 19921112 201406 1 001

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PELABUHAN

  
SLAMET, Ama. PKB, SH  
NIP. 19691208 199703 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESSELON IV  
KEPALA PENGELOLAAN PELABUHAN  
TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Terlaksannya pengawasan Jasa kepelabuhanan	Jumlah pengawasan Jasa kepelabuhanan	18.000

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Ket</b>
1. <b>Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b> * Sub. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 105,341,150.00	APBD


*Total*

**Rp. 105,341,150.00**

Palu, 05 November 2025

PIHAK PERTAMA  
KEPALA UPTD PENGELOLAAN PRASARANA  
PERHUBUNGAN

PIHAK KEDUA  
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PELABUHAN

  
ZULFAHMI I.H, S.STP  
NIP. 19921112 201406 1 001

  
SLAMET, Ama. PKB, SH  
NIP. 19691208 199703 1 008